

Analisis wacana digital akun Kompas nasionalisme dan identitas LPDP platform x

Merdianov Tracita Safitri Hendarto*, Saifuddin Zuhri

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

*Email korespondensi: merdianovtracita29@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2026; Direvisi: 27 Oktober 2026; Terbit: 30 Oktober 2026

Abstract

The evolution of the X platform has transformed digital spaces into arenas for identity formation and national meaning contestation, as exemplified by the February 2026 LPDP alumni controversy regarding their child's foreign citizenship. This study analyzes the forms of nationalism discourse and national identity construction in the comment section of Kompas.com's official X account. Drawing on Rodney H. Jones's Digital Discourse Analysis framework which encompasses text, context, interaction, ideology, and power dimensions, this descriptive qualitative study utilizes a rigorous single case study design. The research corpus consists of secondary text data purposively documented from ten official posts of the @kompascom account. The results reveal a sharp and distinct polarization of the digital public discourse into two main axes. The dominant normative-punitive nationalism axis frames public scholarships as a trust demanding reciprocal loyalty, enforcing rigid citizenship boundaries through taxpayer sentiment, digital moral policing, and cancel culture. Conversely, the cosmopolitan citizenship axis serves as a powerful counter-narrative, separating the conceptual state from its administrative managers and redirecting criticism toward structural government policies. These findings theoretically indicate that in the digital era, nationalism has shifted from a static ideological entity into a dynamic, fluid space of meaning negotiated bottom-up through social platform affordances. This study contributes significantly to the understanding of affective publics concerning public fund accountability in Indonesia.

Keywords: Digital nationalism; national identity; digital discourse analysis; LPDP awardee; X platform.

Abstrak

Perkembangan platform X telah mentransformasi ruang digital menjadi arena kontestasi makna dan pembentukan identitas kebangsaan, seperti yang terlihat dalam polemik alumni LPDP pada Februari 2026 terkait status kewarganegaraan asing anaknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wacana nasionalisme dan konstruksi identitas kebangsaan pada kolom komentar akun X resmi Kompas.com. Dengan menggunakan kerangka Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones yang mencakup dimensi teks, konteks, interaksi, ideologi, dan kekuasaan, penelitian kualitatif deskriptif ini menerapkan desain studi kasus tunggal yang mendalam. Korpus penelitian bersumber dari data sekunder berupa dokumentasi teks komentar pada sepuluh unggahan resmi akun @kompascom yang dikumpulkan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi diskursus publik digital ke dalam dua poros utama secara tajam. Poros nasionalisme normatif-punisi menjadi wacana dominan yang memaknai beasiswa sebagai amanah publik penuntut loyalitas resiprokal, serta mematok batas warga negara melalui sentimen pembayar pajak, kepolisian moral digital, dan cancel culture. Sebaliknya, poros kewarganegaraan kosmopolitan hadir sebagai narasi tandingan yang memisahkan konsep negara dari pengelolanya serta mengalihkan kritik ke ranah struktural kebijakan pemerintah. Temuan ini secara teoretis membuktikan bahwa di era digital, nasionalisme tidak lagi bersifat statis (given), melainkan bergeser menjadi ruang kontestasi makna yang dinamis, cair, dan dinegosiasikan secara bottom-up melalui affordances platform media sosial. Kontribusi penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai dinamika affective publics dalam menyikapi kebijakan dan akuntabilitas dana pendidikan di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Nasionalisme digital; identitas kebangsaan; analisis wacana digital; awardee LPDP; platform X.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga melakukan aktivitas berwarganegara. Dalam ekosistem ini, media sosial bertransformasi menjadi ruang kontestasi nilai kebangsaan, di mana ideologi seperti Pancasila dan kebhinekaan terus dinegosiasikan, diuji, dan dimaknai ulang secara dinamis oleh publik digital (Tunggali & Nasher, 2026). Media sosial yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai sarana interaksi personal kini berkembang menjadi media strategis dalam membangun diskursus publik, menyampaikan opini, dan menjalin negosiasi atas isu-isu sosial politik (Fuchs, 2021). Perubahan tersebut turut memengaruhi dinamika nasionalisme, terutama dalam penyampaian pesan kebangsaan yang semakin menyesuaikan karakteristik pengguna media sosial. Publik saat ini cenderung lebih aktif dalam merespons konten yang bersifat emosional, personal, dan memiliki kedekatan dengan realitas sosial sehari-hari dibandingkan narasi kebangsaan yang bersifat formal dari negara (Papacharissi, 2015).

Salah satu platform yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah X (sebelumnya Twitter). Platform ini menawarkan format teks ringkas yang didukung algoritma interaksi real-time sehingga memungkinkan sebuah isu menjangkau ruang publik secara luas dan memicu diskusi massal dalam waktu singkat. Berdasarkan karakteristiknya, X menjadi salah satu media sosial utama di Indonesia yang kerap digunakan warganet untuk merespons berbagai kebijakan publik dan fenomena sosial. Tingginya intensitas penggunaan platform X menjadikan media tersebut tidak hanya sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang efektif bagi kontestasi makna dan pembentukan opini kolektif.

Seiring berkembangnya platform X, muncul fenomena mobilisasi massa digital yang dikenal sebagai *affective publics*, di mana warganet mengekspresikan sentimen dan kemarahan kolektif terhadap isu tertentu. Dalam praktiknya, ekspresi nasionalisme tidak lagi dilakukan melalui pendekatan normatif yang menampilkan kepatuhan pasif, melainkan bergeser menuju partisipasi aktif dan kritis (Mihelj & Jiménez-Martínez, 2021). Pendekatan ini mengutamakan penilaian publik berdasarkan moralitas, keadilan sosial, maupun akuntabilitas moral yang relevan dengan kehidupan warganet, sehingga perdebatan mengenai identitas kebangsaan terasa lebih cair dan tidak lagi didominasi oleh narasi tunggal pemerintah (Zappavigna, 2012).

Salah satu polemik yang memicu ekspresi nasionalisme masif di ruang publik digital adalah isu mengenai penerima beasiswa publik. Diskursus mengenai akuntabilitas penerima beasiswa merupakan teknik penyampaian pandangan moral yang mampu membangun keterlibatan emosional sangat tinggi antara warganet dengan isu yang dibahas. Melalui isu ini, informasi mengenai kewajiban moral tidak hanya disampaikan sebagai aturan hukum, tetapi menjadi bagian dari sebuah perdebatan nilai yang dekat dengan sensitivitas keadilan masyarakat. Dalam perspektif komunikasi, keterlibatan emosional yang intens dari publik ini esensinya mirip dengan upaya komunikasi persuasif yang krusial untuk membangun kesadaran kolektif serta mempertahankan nilai-nilai loyalitas dan kontribusi nyata terhadap suatu entitas atau komunitas sosial (Rosadiputri & Christin, 2021). Pendekatan tersebut membuat publik lebih mudah terdorong untuk memberikan penilaian, kecaman, maupun pembelaan di media sosial dibandingkan isu-isu regulasi yang bersifat administratif semata.

Dalam konteks media sosial, wacana nasionalisme berkembang menjadi strategi komunikasi digital yang memadukan unsur teks, konteks ruang, interaksi antar-pengguna, serta relasi kekuasaan ideologis untuk menegosiasikan identitas kebangsaan. Rodney H. Jones menjelaskan bahwa Analisis Wacana Digital (*Digital Discourse Analysis*) terdiri atas empat dimensi utama, yaitu dimensi teks, konteks, interaksi, serta ideologi dan kekuasaan (Jones et al., 2015). Dimensi teks menekankan pada struktur kebahasaan digital sebagai dasar penyampaian pesan. Dimensi konteks menghubungkan teks tersebut dengan lingkungan digital tempat pesan diproduksi. Sementara itu, dimensi interaksi dan ideologi berfungsi untuk membedah bagaimana relasi kuasa dan nilai-nilai tertentu dinegosiasikan oleh pengguna ketika merespons sebuah fenomena (Jones et al., 2015).

Pendekatan tersebut sangat relevan untuk membedah fenomena percakapan warganet dalam merespons konten di platform X. Salah satu kasus yang secara konsisten memicu perdebatan nasionalisme digital adalah polemik alumni *awardee* Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Februari 2026 mengenai status kewarganegaraan asing anaknya. Isu tersebut bergulir di media sosial hingga memicu perhatian dari jutaan pengguna dan akun media berita mainstream, salah satunya melalui unggahan resmi akun @kompascom. Dalam berbagai komentar yang masuk, warganet tidak menempatkan status hukum sebagai fokus utama, tetapi menyisipkannya ke dalam narasi moralitas publik, tuntutan loyalitas resiprokal, hingga kritik struktural sehingga perdebatan terasa sangat emosional.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan lanskap konstruksi identitas kebangsaan di era digital. Nasionalisme tidak lagi dipromosikan melalui penjelasan doktriner

secara langsung, tetapi melalui perdebatan organik yang mampu membangun polarisasi tajam di kalangan publik digital. Narasi yang disampaikan oleh warganet tidak hanya bertujuan merespons kasus individu, melainkan juga menciptakan batas demarkasi moral, menghakimi loyalitas, serta menegosiasikan kembali makna kewarganegaraan kosmopolitan di tengah arus globalisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk nasionalisme digital. Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa interaksi di media sosial mampu meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal moralitas bangsa (Hadiputri & Trenggono, 2023). Penelitian mengenai wacana digital juga menunjukkan bahwa kombinasi teks dan fitur platform mampu meningkatkan ketertarikan serta keterlibatan emosional audiens terhadap isu-isu kewarganegaraan (Zappavigna, 2012). Sementara itu, studi terbaru menemukan bahwa sentimen pembayar pajak (*taxpayer sentiment*) di media sosial mampu membuat penegakan moralitas publik digital berfungsi sebagai kepolisian moral dan *cancel culture* (Anwar & Zamzamy, 2026).

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis dinamika nasionalisme dalam pusaran polemik alumni *awardee* LPDP menggunakan pendekatan empat dimensi Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum administrasi beasiswa maupun nasionalisme dalam konteks politik elektoral secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji bagaimana dimensi teks, konteks, interaksi, serta ideologi dan kekuasaan diterapkan secara sistematis dalam menganalisis polarisasi wacana yang dipublikasikan pada kolom komentar akun X @kompascom.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal terhadap korpus komentar bersih dari sepuluh unggahan resmi akun @kompascom mengenai polemik tersebut (Yin, 2018). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk penerapan poros nasionalisme normatif-punisif dan poros kewarganegaraan kosmopolitan dalam setiap komentar, serta memahami bagaimana platform X dimanfaatkan sebagai ruang kontestasi makna nasionalisme digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi digital, khususnya mengenai penggunaan analisis wacana digital dalam membedah hubungan emosional, identitas kebangsaan, dan relasi kekuasaan antara warganet, media, dan negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digital (*qualitative digital discourse analysis*) untuk mengkaji penafsiran makna nasionalisme dan konstruksi identitas kebangsaan dalam polemik alumni *awardee* LPDP di platform X. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, membedah, dan menginterpretasikan secara mendalam bagaimana unsur-unsur wacana dibentuk, diproduksi, dan dinegosiasikan melalui interaksi publik digital pada kolom komentar, bukan untuk mengukur hubungan kausalitas antarvariabel secara kuantitatif. Metode analisis wacana digital digunakan sebagai pisau analisis utama karena mampu melampaui analisis teks linguistik konvensional dengan memfasilitasi peneliti untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan pesan-pesan komunikasi, ekspresi sentimen afektif, dan manifestasi relasi kuasa yang terkandung dalam setiap komentar berdasarkan karakteristik arsitektur teknologi platform dan ruang sosial-politik yang melingkupinya. Melalui metode ini, bahasa di media sosial tidak sekadar dipandang sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai bentuk praktik sosial digital yang dinamis, konflikktual, dan kontestatif.

Subjek dalam penelitian ini adalah akun resmi Kompas.com di platform X (@kompascom) yang dipilih berdasarkan posisinya sebagai representasi media berita *mainstream* nasional di Indonesia dengan basis pengikut besar dan aktif memproduksi unggahan informasi mengenai isu publik strategis, sehingga memicu keterlibatan (*engagement*) publik digital yang heterogen. Sementara itu, objek penelitian berupa korpus data teks komentar bersih (*clean text comments*) pada sepuluh unggahan resmi terkait polemik alumni *awardee* LPDP yang dipublikasikan sepanjang bulan Februari 2026. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria spesifik yang meliputi komentar warganet yang memuat unsur ekspresi moralitas, sinisme, atau penghakiman sosial; komentar yang berisi tuntutan akuntabilitas, pemenuhan janji, atau loyalitas resiprokal atas pemanfaatan beasiswa yang bersumber dari dana publik (*taxpayer money*); serta komentar yang berisi argumen pembelaan terhadap hak mobilitas global, rasionalitas pilihan individu, atau perspektif kewarganegaraan kosmopolitan, agar relevan untuk dibedah menggunakan model analisis Rodney H. Jones.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi dokumentasi digital dan studi pustaka. Studi dokumentasi digital diterapkan melalui metode pengamatan langsung non-partisipan (*unobtrusive method*) terhadap aktivitas komentar publik pada sepuluh unggahan terpilih di akun X @kompascom, di mana peneliti melakukan

penambahan data secara manual dan melakukan pembersihan data (*data cleaning*) untuk menyaring teks yang memenuhi kriteria tanpa melibatkan interaksi langsung atau wawancara dengan pemilik akun. Setiap teks komentar diamati secara cermat dan berulang untuk mengidentifikasi aspek mikro-linguistik seperti pilihan diksi, penggunaan tanda baca, simbol emotikon, gaya bahasa khas ekosistem digital seperti sarkasme, satire, dan makian, hingga pola sitasi antarpengguna seperti *mention* dan *reply*. Sebagai data pendukung untuk memperkuat proses analisis, peneliti juga mengumpulkan tangkapan layar (*screenshot*) unggahan berita asli, transkrip narasi teks komentar secara utuh, pencatatan jumlah metrik interaksi (*reposts*, *likes*, *replies*), serta rekonstruksi lini masa (*timeline*) kronologis kemunculan isu. Di sisi lain, studi pustaka dilakukan dengan menelaah secara kritis berbagai literatur akademis, termasuk buku teks utama, jurnal ilmiah bereputasi, dan prosiding penelitian terdahulu yang difokuskan pada konsep nasionalisme digital, identitas kebangsaan, analisis wacana kritis, *affective publics*, dinamika ruang publik digital, fungsionalitas media sosial X, serta kerangka teoretis Analisis Wacana Digital yang dikembangkan oleh Rodney H. Jones.

Analisis data mengacu pada tahapan Analisis Wacana Digital model Rodney H. Jones yang diadaptasi secara sistematis ke dalam empat dimensi operasional. Pertama, analisis dimensi teks dilakukan dengan menetapkan setiap komentar warganet sebagai unit analisis linguistik terkecil untuk membedah struktur teks, pilihan kosakata (*vocabulary*), modalitas, dan gaya komunikasi digital guna melihat bagaimana penilaian moral dikonstruksikan melalui bahasa. Kedua, analisis dimensi konteks diimplementasikan dengan memetakan konteks multi-level, baik konteks mikro berupa karakteristik arsitektur teknologi platform X (*affordances*) yang memicu viralitas, maupun konteks makro berupa realitas sosial-politik di Indonesia, guna menghubungkan teks komentar dengan isu akuntabilitas dana publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada Februari 2026. Ketiga, analisis dimensi interaksi berfokus pada bagaimana pengguna media sosial saling berhubungan dan merespons dalam kolom komentar dengan mengelompokkan data berdasarkan pola keterhubungan (seperti *ambient affiliation*) yang membentuk polarisasi atau jaringan sentimen kolektif. Keempat, analisis dimensi ideologi dan kekuasaan menjadi tahap interpretasi terdalam untuk melihat bagaimana ideologi nasionalisme normatif-punisif dipertentangkan dengan narasi pembelaan kewarganegaraan kosmopolitan sebagai bentuk negosiasi nilai kebangsaan, hingga akhirnya seluruh hasil disintesis secara deskriptif-analitis dan dikonfirmasi dengan teori serta temuan empiris terdahulu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Polemik mengenai alumni *awardee* Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan fenomena diskursus publik digital yang bergulir masif sejak Februari 2026 melalui unggahan viral di platform X. Isu ini awalnya muncul dari narasi personal seorang alumni mengenai status kewarganegaraan asing anaknya, kemudian berkembang pesat menjadi ruang kontestasi makna kebangsaan yang memobilisasi kemarahan kolektif (*affective publics*) warganet. Akun resmi Kompas.com (@kompascom) sebagai media berita mainstream menjadi salah satu muara utama perdebatan ini, di mana kolom komentarnya bertransformasi menjadi arena bagi publik digital untuk menegosiasikan ulang batasan moralitas dan loyalitas. Dengan jangkauan informasi yang luas, unggahan terkait kasus ini mengusung nilai akuntabilitas publik, namun tetap berfokus pada penghakiman moralitas individu sebagai pusat narasi dan diskusi di ruang siber.

Kolom komentar Kompas.com pada awalnya diposisikan sebagai ruang diskusi publik yang terbuka dan demokratis. Namun, seiring bergulirnya isu tersebut, ruang digital ini menghadapi polarisasi tajam akibat benturan pandangan mengenai hak kewarganegaraan dan kewajiban moral resiprokal. Salah satu poros utama yang mendominasi reaksi berasal dari akun-akun warganet yang menyuarakan sentimen pembayar pajak (*taxpayer sentiment*), yang mengutuk keras keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan amanah uang rakyat. Meskipun dibungkus dengan argumen etis, penggunaan istilah-istilah punisif dan makian vulgar merepresentasikan praktik *cancel culture* dan kepolisian moral digital terhadap individu di ruang siber. Reaksi keras dan masif dari anggota publik digital ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang kaku terhadap batasan identitas kebangsaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana publik digital membentuk dan mempertandingkan wacana nasionalisme melalui empat dimensi utama dalam *Digital Discourse Analysis*: teks, konteks, interaksi, serta ideologi dan kekuasaan (Jones et al., 2015).

Analisis Struktur Teks

Analisis teks dalam wacana digital ini berfokus pada struktur bahasa, diksi, serta nada emosional yang digunakan oleh netizen dalam kolom komentar akun Kompas.com di platform X terkait polemik alumni *awardee* LPDP. Tujuan peneliti menggunakan analisis teks pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pilihan kata, gaya bahasa, dan bentuk narasi yang dipakai warganet dalam mengartikulasikan gagasan nasionalisme serta membentuk konstruksi kolektif mengenai identitas kebangsaan penerima beasiswa LPDP. Wacana mengenai nasionalisme ini muncul sebagai respons atas kontroversi sikap sejumlah

awardee LPDP yang dinilai lebih membanggakan status kewarganegaraan asing anak mereka dibandingkan identitas keindonesiaan, sebuah isu yang diberitakan ulang oleh Kompas.com dan memicu gelombang komentar dari publik digital.



Gambar 1 Komentar oleh @Aku_Pelarianmu

Pada komentar tersebut, akun @Aku_Pelarianmu memberikan respons tegas terhadap pemberitaan mengenai alumni *awardee* LPDP pembuat unggahan yang membagikan status kewarganegaraan asing anaknya. Tindakan alumni tersebut menjadi pemantik diskursus karena dinilai merepresentasikan pengabaian tanggung jawab sosial dan perilaku oportunis terhadap fasilitas negara di ruang digital yang sangat sensitif terhadap isu keadilan. Respons @Aku_Pelarianmu yang berbunyi, *"Udah dibiayai negara pakai uang rakyat, sekolah tinggi-tinggi, eh yang dibanggain malah anak berkewarganegaraan negara lain. Ini bukan soal pilihan pribadi, tapi soal tahu diri. LPDP itu bukan dana pribadi, itu amanah publik,"* mencerminkan kemarahan kolektif terhadap rusaknya komitmen moral yang seharusnya mereka emban. Melalui pernyataan "uang rakyat" dan "amanah publik," ia menegaskan adanya ingatan historis tentang dana LPDP sebagai instrumen pengabdian bagi negara yang berasal dari pembayar pajak, bukan sebagai modal untuk privilese personal. Selain melalui penyebutan eksplisit istilah amanah publik, dinamika wacana dalam polemik ini juga terlihat dari pemilihan bahasa yang sarat emosi. Penggunaan kata bernada menghukum, pelabelan, dan nada kemarahan yang intens tidak sekadar menunjukkan reaksi spontan individu, tetapi juga menandakan luapan emosional kolektif dari warganet (*affective publics*) yang merasa keadilan sosial mereka dikhianati.



Gambar 2 Komentar oleh @Kadrungs

Komentar tersebut memadukan berbagai unsur linguistik seperti penggunaan kata kasar, kalimat bernada menghukum (punisif), dan pelabelan ekstrem. Pemakaian kata kasar seperti "*sampah*" menunjukkan intensitas emosi yang kuat sebagai bentuk kemarahan terhadap subjek yang dianggap mencederai wibawa bangsa di ruang digital. Nada emosional dalam cuitan ini berfungsi sebagai ekspresi perlawanan terhadap struktur hak istimewa (*privilege*) yang masih menempatkan keuntungan pada segelintir elite terdidik, bukan pada rakyat pembayar pajak yang berkorban untuk negara. Ungkapan tersebut memperlihatkan sentimen dan ironi yang dirasakan publik ketika beasiswa yang selama ini dianggap sebagai wadah bakti kepada negara justru menuntut warganet menelan kekecewaan atas hilangnya identitas kebangsaan sang penerima.

Gaya komunikasi yang paling menonjol dalam respons publik digital terhadap polemik alumni ini adalah penggunaan sarkasme sebagai bentuk perlawanan simbolik. *Sarcasm* digunakan sebagai strategi retorik untuk mengejek, mempermalukan, sekaligus membalikkan logika instansi maupun oknum alumni yang dinilai tidak transparan dan berlindung di balik pembelaan administratif. Melalui sarkasme, warganet tidak hanya mengekspresikan kemarahan, tetapi juga melakukan resistansi simbolik terhadap narasi pembelaan dari pihak kementerian yang dianggap lambat dan sekadar melakukan pembelaan formalitas belaka. Kalimat-kalimat sarkastik yang muncul antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 Kalimat Sarkastik

Username	Komentar/kutipan
@PaulJasonKlei	"Mati dah tu si saset"
@sixbasss	"Memantau kok bertahun-tahun, klo ini ga viral lu tetep memantau tolol namanya."
@_hay_	"Ngibul budaya bangsa. Coba ditanya ada berapa yg dipantau sebenarnya? Mereka ini ngibul dah ga pake usaha tampil meyakinkan. Licin betul lidah."
@ariomalv	"edun makin panas, lama lama ama buzzerrp digoreng jadi "diripid lpdp minding imbigi! inik kinying, jidi mikin pintir!" (Menyertakan potongan gambar meme berisi ekspresi wajah marah)"
@fortisfortun	"Si Sachet mantu sekjen kementerian tapi nge branding nya PPM alias pura pura miskin"

Melalui kata-kata yang sarat sindiran tajam, warganet tidak hanya mengekspresikan rasa muak, jijik, dan marah, tetapi juga melakukan tindakan simbolik dengan menyerang pihak

kementerian dan subjek melalui logika terbalik. Hal ini terlihat pada pernyataan akun @sixbasss yang secara eksplisit mengejek absurditas klaim pengawasan dari institusi dengan kalimat, *"Memantau kok bertahun-tahun, klo ini ga viral lu tetep memantau..."*. Gaya sarkasme semacam ini tidak semata menjadi sarana untuk meluapkan amarah, melainkan juga berfungsi mempermalukan pihak penyelenggara secara sosial dan menelanjangi posisi kuasa yang mereka klaim. Pemanfaatan istilah bernada ejekan seperti *"si saset"* dan tuduhan *"PPM alias pura pura miskin"* oleh akun @fortisfortun... secara tajam membongkar ketimpangan kelas sosial dan latar belakang subjek yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat kementerian (*mantu sekjen*).

Gaya tutur sarkasme ini sejalan dengan dimensi teks dan dalam analisis wacana digital (Jones et al., 2015). yang menjelaskan bahwa bahwa penggunaan gaya bahasa yang memuat celaan keras, pahit, dan bersifat menegasikan berfungsi sebagai strategi retorik untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang menjadi sasaran. Melalui gaya tutur tersebut, penulis komentar seakan membalik relasi kekuasaan, merendahkan akuntabilitas birokrasi pemerintah yang dinilai tidak rasional, serta meruntuhkan *personal branding* subjek yang dianggap manipulatif demi mendapatkan simpati publik.

Meski kemarahan dan sentimen punisif mendominasi banyak unggahan, luapan emosi tersebut tidak berdiri sendiri. Di balik ekspresi resistansi yang keras dari kelompok dominan, muncul pula diskursus tandingan yang dihadirkan oleh kelompok warganet dari poros kewarganegaraan kosmopolitan. Poros ini berupaya mengalihkan fokus perdebatan dari level kesalahan individu menuju level kritis-struktural guna mempertanyakan kapasitas, akuntabilitas, dan legitimasi moral para pemegang kebijakan. Solidaritas dan pembelaan logis muncul sebagai penyeimbang, membentuk ruang argumentasi rasional yang berupaya membedah realitas sistemik di balik keputusan personal subjek. Fenomena ini tampak jelas dalam sejumlah komentar berikut:

Tabel 2 Komentar

Username	Komentar/kutipan
#Warga Merdeka... :	<i>"Hrs dibedakan negara sama penyelenggaranya, yg dia kritik itu pnyelenggara negara ini yg korup dn nepotisme, lgian itu uang rakyat buat rakyat bukan uang kalian..."</i>
@BalatonSlagereg :	<i>"Heh !!! @KemenkeuRI Dari tadi yang menghina negara ini siapa ? KAGAK ADA ! Kita itu MENKRITIK pemerintahannya, bukan negaranya !..."</i>

@DaniPutra2	<i>"Padahal yang dihina itu bukan negara, tapi pengelola negara. Menteri itu harus banyak belajar filsafat agar terbiasa berfikir mendasar. Kedangkalan adalah wujud kebodohan."</i>
@aa_hamzah	<i>"Kalau menurut gue sih itu hak dia. Emang negara banyak yg ga beres. Lihat aja pemimpin kita masih banyak yang paket c dan tidak kompeten. Orang pintar disingkirkn..."</i>

Kumpulan komentar di atas merefleksikan bentuk wacana kritis yang menegaskan adanya negosiasi makna atas identitas kebangsaan dan loyalitas di ruang siber. Pembelaan tidak diwujudkan dalam bentuk membenaran buta terhadap pelanggaran aturan, melainkan melalui dekonstruksi linguistik yang secara konsisten memisahkan antara konsep abstrak "negara" sebagai entitas kebangsaan, dengan "pengelola negara" atau "pemerintah" sebagai pemegang kuasa administratif. Hal ini tampak jelas pada pernyataan akun Fuad (@BalatonSlagereg) yang secara emosional menegaskan batas konseptual tersebut melalui penggunaan huruf kapital: *"KAGAK ADA ! Kita itu MENGKRITIK pemerintahannya, bukan negaranya !"*.

Melalui pilihan bahasa yang bersifat argumentatif-rasional, warganet membalikkan tuduhan "anti-nasionalisme" yang dialamatkan kepada subjek menjadi sebuah kritik struktural terhadap rusaknya sistem di dalam negeri. Akun Dani Putra (@DaniPutra2) membalik relasi kekuasaan tersebut secara tajam dengan menyerang balik kapasitas intelektual penguasa melalui kalimat, *"Menteri itu harus banyak belajar filsafat agar terbiasa berfikir mendasar."* Narasi ini menelanjangi apa yang disebutnya sebagai "kedangkalan" aparat dalam merespons fenomena publik.

Argumentasi dari akun andi hamzah (@aa_hamzah) juga memperlihatkan bagaimana keputusan personal subjek dirasionalisasikan sebagai hak individu yang wajar di tengah realitas sistemik negara yang dinilai *"banyak yg ga beres"* dan tidak menghargai meritokrasi (*"orang pintar disingkirkn"*). Kumpulan respons ini memperlihatkan bahwa melalui interaksi dan narasi yang beredar, publik digital tidak bersikap pasif. Sebaliknya, mereka memanfaatkan *affordances* platform X untuk menantang wacana nasionalisme doktriner yang kaku, serta menegaskan posisi korban struktural dari tata kelola pemerintahan yang dianggap korup dan nepotis.

Analisis Struktur Konteks

Berdasarkan hasil analisis, kontestasi nasionalisme dalam kolom komentar akun X Kompas.com tidak muncul secara spontan, tetapi dibentuk oleh rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Wacana diawali dari unggahan personal alumni penerima beasiswa LPDP di platform Threads mengenai kewarganegaraan anaknya yang kemudian menyebar ke berbagai platform media sosial hingga menjadi viral di X. Pemberitaan Kompas.com yang memuat respons pejabat pemerintah terhadap isu tersebut semakin memperluas jangkauan diskusi dan memicu munculnya polarisasi pendapat di ruang komentar.

Isu ini berkembang menjadi perdebatan publik karena berkaitan dengan posisi LPDP sebagai beasiswa yang bersumber dari dana publik. Kondisi tersebut membentuk ekspektasi masyarakat bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi kepada negara. Akibatnya, unggahan yang berkaitan dengan pilihan kewarganegaraan dipersepsikan sebagian warganet sebagai bentuk berkurangnya loyalitas terhadap negara dan dianggap bertentangan dengan amanah publik yang melekat pada status sebagai penerima beasiswa LPDP.

Di sisi lain, sebagian warganet memanfaatkan momentum tersebut untuk mengkritik penyelenggara negara. Komentar-komentar yang muncul tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga mengangkat persoalan yang lebih luas, seperti korupsi, nepotisme, standar ganda dalam penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya manusia oleh pemerintah. Melalui pola argumentasi tersebut, warganet membedakan secara tegas antara kritik terhadap pemerintah dengan kecintaan terhadap negara, sehingga terbentuk narasi tandingan terhadap pandangan nasionalisme normatif yang mendominasi ruang komentar.

Perkembangan wacana juga dipengaruhi oleh karakteristik platform X yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat melalui fitur repost, kutipan, dan algoritma yang mendorong interaksi berbasis emosi (Jones et al., 2015). Struktur platform tersebut membuat berbagai bentuk ekspresi, mulai dari unggahan personal, pemberitaan media, komentar publik, hingga respons pejabat, bertemu dalam satu ruang diskusi yang sama. Akibatnya, batas antara persoalan privat dan kepentingan publik menjadi semakin kabur sehingga perdebatan berkembang menjadi kontestasi nasionalisme yang melibatkan berbagai aktor dengan sudut pandang yang berbeda.

Secara keseluruhan, analisis dimensi konteks menunjukkan bahwa kontestasi nasionalisme dalam kasus ini dibentuk oleh pertemuan antara peristiwa viral, pemberitaan media, karakteristik platform X, serta kondisi sosial-politik Indonesia yang berkaitan dengan

akuntabilitas penggunaan dana publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pertukaran pendapat, tetapi juga menjadi arena tempat identitas kebangsaan, tanggung jawab publik, dan hubungan antara masyarakat dengan negara dinegosiasikan secara terbuka (Papacharissi, 2015).

Analisis Struktur Interaksi

Dalam pendekatan Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones (2015), dimensi aksi dan interaksi menegaskan bahwa praktik berbahasa di ruang siber tidak sekadar memproduksi makna tekstual secara pasif, melainkan berfungsi sebagai instrumen aktif untuk membangun relasi sosial, menegosiasikan kekuasaan, atau meluncurkan resistensi (Jones et al., 2015). Melalui *affordances* platform X seperti struktur utas (*threading*), kutipan (*quoted repost*), dan visibilitas metrik, warganet mampu mengonstruksi arena kontestasi diskursif yang dinamis (Zappavigna, 2012). Dalam polemik alumni LPDP, respons warganet melampaui ekspresi emosional individual dan berkembang menjadi aksi interaktif yang terorganisasi secara sosial. Pola komentar yang saling bertautan ini bekerja secara berantai, di mana satu opini berfungsi memvalidasi, memperkuat, atau menantang narasi lain dalam pembentukan wacana nasionalisme kolektif (Sajian & Alif, 2025).



Gambar 3 Kutipan Ulang oleh @asbunfitri



Gambar 4 Balasan Kutipan Ulang akun @asbunfitri

Fenomena tersebut terepresentasi lewat akun fitri (@asbunfitri) saat merespons pemberitaan Kompas.com mengenai imbauan instansi terkait ("*Pesan Purbaya ke Penerima LPDP: Kalau Enggak Senang, Jangan Menghina Negara Lah*"). Melalui argumen

nasionalisme kontraktual-normatif, @asbunfitri menyatakan: “*Kalo mau menghina negara minimal modal sendiri mbak. Ini dibiayaiin rame-rame malah ngeludahin muka donatur...*”. Penggunaan metafora teks “ngeludahin muka donatur” mengonstruksi tindakan subjek sebagai pelanggaran etis terhadap masyarakat pembayar pajak selaku penyandang dana publik.

Cuitan tersebut tidak berdiri terisolasi, melainkan segera memantik perluasan pesan berbasis *ambient affiliation* (Zappavigna, 2012; Jones et al., 2015) melalui interaksi berantai (*replies*) yang merembet dari ranah mikro (individu) menuju pengukuhan sentimen makro (institusional). Komentar @Stevencepi langsung divalidasi oleh @asbunfitri yang mengekspresikan rasa “gondok” sekaligus menggeser isu pada kelayakan seleksi penerima beasiswa. Eskalasi konflik (*discursive cascade effect*) mencapai puncaknya pada generalisasi punisif oleh Yoshi 2.0 (@NeoHideyoshi): “*Duit kita bayar pajak hanya untuk membiayai produk rusak semua.*” Pernyataan agitatif ini mengonfirmasi perubahan target kemarahan publik dari kesalahan personal seorang alumni (mikro) menjadi delegitimasi massal terhadap efisiensi sistemik pemerintah dan lembaga LPDP (makro) dalam mengelola dana publik (Anwar & Zamzamy, 2026; Bakir & Nurhaqiqi, 2026).

Sekuens aksi ini ditutup oleh konfirmasi kepuasan komunal dari @mrndalstr (“*contoh malu2in diri sendiri...*”). Pola interaksi interaktif yang agresif ini membuktikan bahwa satu unggahan afektif dapat berfungsi sebagai umpan yang memvalidasi massa untuk masuk ke dalam gelombang kebencian tanpa verifikasi objektif (Zappavigna, 2012). Pada akhirnya, dominasi opini kelompok yang intimidatif ini menciptakan mekanisme *spiral of silence* yang membungkam sudut pandang alternatif (Anwar & Zamzamy, 2026), sekaligus memfungsikan teks digital sebagai alat sensor sosial massal yang membatasi kebebasan berekspresi di ruang siber (Jones et al., 2015).

Pola interaksi di kolom komentar akun X Kompas.com menunjukkan bahwa utilitas fitur platform (*replies, retweets, likes, dan quote tweets*) mampu memobilisasi gerakan massa digital secara akseleratif. Interaksi horizontal yang menyebar secara berantai ini memicu efek riam (*cascade effect*) dalam dinamika jaringan digital, yang kemudian mengaktifkan afiliasi lingkungan (*ambient affiliation*) (Zappavigna, 2012). Konsep ini menjelaskan fenomena ketika pengguna yang tidak saling mengenal dan terpisah secara spasial dapat membangun ikatan emosional kolektif yang kuat akibat kesamaan respons terhadap suatu isu. Aktivitas memberikan *likes* pada makian atau melakukan *quote tweet* kritikan bertindak sebagai validasi material untuk melakukan penghakiman massa secara komunal di ruang siber.

Analisis Struktur Ideologi & Kekuasaan

Dalam perspektif Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones (2015), dimensi ideologi dan kekuasaan (*ideology and power*) merupakan lapisan teoretis terdalam untuk menguji bagaimana teks digital berfungsi sebagai instrumen reproduksi atau penantang dominasi nilai di masyarakat. Mengikuti konseptualisasi Michel Foucault mengenai kekuasaan kapiler (*capillary power*), kekuasaan di era digital tidak lagi dipahami secara top-down sebagai otoritas formal negara, melainkan menyebar (*dispersed*) dalam jaringan bahasa, teks, dan praktik diskursif sehari-hari yang diproduksi oleh subjek-subjek digital (Foucault, 2015). Warganet memanfaatkan *affordance* platform X bukan sebagai konsumen ideologi yang pasif, melainkan sebagai agen aktif yang menggunakan modal linguistik untuk menata hierarki kebenaran. Kasus alumni LPDP ini menjadi mikrokosmos yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan dinegosiasikan secara riuh melalui benturan dua ideologi besar: nasionalisme normatif dan kewarganegaraan kosmopolitan.

Ideologi nasionalisme normatif bekerja dengan mengonstruksi kesadaran bahwa warga negara memiliki utang etis dan kontrak moral yang rigid terhadap tanah air, terutama ketika individu tersebut menyerap investasi modal sosial-ekonomi dari akumulasi pajak rakyat (Hadiputri & Trenggono, 2023). Manifestasi ideologi ini terwujud dalam teks-teks penegak batas moralitas komunal yang menuntut loyalitas mutlak dan pengabdian pascastudi seperti yang direfleksikan pada komentar berikut:



Gambar 1 Komentar oleh @HL_Iqbal



Gambar 6 Kutipan ulang @repvblicy

Penganut ideologi ini meradikalisasi pengabaian komitmen nasionalis sebagai "pengkhianatan moral" yang mencederai keadilan publik, sehingga melegitimasi tindakan represif negara. Sebaliknya, ruang digital yang desentralistik memfasilitasi munculnya resistensi melalui ideologi kewarganegaraan kosmopolitan. Ideologi penantang ini menolak klaim kepemilikan mutlak negara atas pilihan hidup individu dengan memandang manusia sebagai warga global yang memiliki hak universal untuk bermobilitas demi kesejahteraan.

Manifestasi kosmopolitanisme ini terepresentasi lewat cuitan @_dwirianto dan @DaniPutra2 yang mendekonstruksi kesakralan batas teritorial sebagai hak alamiah yang rasional.



Gambar 7 Komentar oleh @DaniPutra2

Mereka secara tegas memisahkan antara esensi negara dengan ketidakcakapan para pengelolanya, sekaligus membalikkan tuduhan kedangkalan moral kepada elite politik yang dinilai gagal menyediakan ekosistem domestik yang fungsional.

Melalui lensa Stuart Hall mengenai identitas sebagai konstruksi diskursif, identitas nasional tidak pernah bersifat statis atau final, melainkan terus diproduksi dan dipertentangkan melalui representasi Bahasa (Hall, 1990 dalam Griffin, 2011). Benturan wacana di platform X secara aktif membangun sistem eksklusi dan inklusi biner antara "warga negara nasionalis" dan "pengkhianat". Konstruksi ini terlihat saat akun SUAZANA (@Aku_Pelarianmu) mematok batas identitas melalui retorika etis publik:

"Ini bukan soal pilihan pribadi, tapi soal tahu diri. LPDP itu bukan dana pribadi, itu amanah publik."

Frasa tersebut menyingkirkan subjek ke luar dari lingkaran identitas warga negara yang beretika. Sebaliknya, akun andi hamzah (@aa_hamzah) melakukan rekonstruksi identitas tandingan untuk menormalisasi pilihan subjek:

"Kalau menurut gue sih itu hak dia. Emang negara banyak yg ga beres..."

Pernyataan ini mengubah posisi subjek dari seorang pelanggar moral menjadi korban rasional dari sistem domestik yang disfungsional. Identitas kebangsaan dalam diskursus ini bertransformasi menjadi produk linguistik yang dinegosiasikan secara agresif di linimasa. Kontestasi ini membongkar relasi kuasa kompleks yang melibatkan tiga aktor utama secara simultan. *Pertama*, Negara (LPDP dan Kementerian Keuangan) yang memegang kuasa institusional-legal formal untuk menetapkan regulasi, sanksi *blacklist*, dan tuntutan finansial. *Kedua*, Warganet X yang memegang kuasa pengawasan lateral sebagai "polisi moral" digital (Trottier, 2017). Dengan kemampuan memobilisasi *cancel culture* dan mendikte tindakan cepat institusi melalui tekanan viralitas, seperti desakan akun kohlervooler ("*BALIKIN TUH DUIT RAKYAT!*"). *Ketiga*, Platform X itu sendiri yang melalui arsitektur teknologis dan algoritmanya memegang kendali atas sirkulasi kekuasaan. Algoritma platform sengaja mengamplifikasi polarisasi demi menaikkan metrik keterlibatan pengguna (*engagement*).

Dengan memberi visibilitas tinggi pada komentar ekstrem yang bermuatan makian (seperti akun BC4LIFE dan Anak Sakti) maupun provokasi politik (seperti akun Warkop Mutualan), platform mengomandoi jalannya debat publik agar terus berada dalam ketegangan biner.

Secara keseluruhan, analisis dimensi ini membuktikan bahwa polemik alumni LPDP mencerminkan pertarungan ideologis mendasar mengenai rekonstruksi makna "warga negara Indonesia" di era digital global. Ruang siber telah bertransformasi menjadi arena pengadilan diskursif (*discursive court*) tempat batas-batas loyalitas pada tanah air terus diuji, didekonstruksi, dan dinegosiasikan secara terbuka (Anwar & Zamzamy, 2026; Hadiputri & Trenggono, 2023). Di era kontemporer, identitas kebangsaan tidak lagi sekadar ditentukan oleh kepemilikan paspor fisik atau kepatuhan hukum formal, melainkan menjadi sebuah produk yang cair dan terus diperebutkan di tengah pusaran tuntutan loyalitas nasional, hak mobilitas global, kritik struktural terhadap pemerintah, dan kuasa algoritmik platform (Fuchs, 2021).

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang mengacu pada model Analisis Wacana Digital Rodney H. Jones, kontestasi nasionalisme dalam kolom komentar akun X Kompas.com pada polemik alumni penerima beasiswa LPDP menunjukkan bahwa ruang digital telah bertransformasi menjadi arena yang dinamis sekaligus konflikual. Di ruang siber ini, berbagai makna mengenai identitas kebangsaan, tanggung jawab publik, dan hakikat hubungan kontraktual antara masyarakat dengan negara tidak lagi bersifat statis (*given*), melainkan terus diproduksi, direproduksi, dan dipertentangkan secara *bottom-up*. Kasus ini membuktikan bahwa polemik personal seorang warga negara dapat memicu resonansi diskursif berskala besar yang menguji kembali batas-batas loyalitas normatif di era globalisasi.

Melalui analisis dimensi teks, ditemukan bahwa penggunaan bahasa dan struktur kebahasaan digital dalam komentar tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyampaian pendapat pasif. Lebih jauh dari itu, teks digital beroperasi sebagai instrumen aktif untuk membangun penilaian moral dan sanksi sosial terhadap subjek melalui polarisasi yang sangat tajam. Hal ini terlihat dari penggunaan kosakata dan diksi yang bersifat menghukum (*punitive wording*), luapan ekspresi emosional yang agitatif (*high-arousal emotions*), serta konstruksi argumentasi rasional yang mencoba melakukan pembelaan. Bahasa di platform X sengaja diproduksi secara ringkas namun padat muatan afektif guna mereduksi kompleksitas perdebatan hukum menjadi sebuah penghakiman moral biner demi menarik perhatian massa.

Pada dimensi konteks, ditemukan bahwa perdebatan mengenai alumni LPDP ini merupakan hasil pertemuan dari rangkaian peristiwa yang terintegrasi lintas platform, meliputi unggahan personal di Threads, amplifikasi pemberitaan media massa, respons formal pejabat pemerintah, serta karakteristik arsitektur teknologi platform X yang mempercepat penyebaran informasi. Status pendanaan LPDP yang bersumber dari dana publik (*taxpayer money*) menjadi jangkar konteks makro yang sangat krusial dalam membentuk ekspektasi kolektif di masyarakat mengenai adanya utang etis dan kewajiban moral resiprokal penerima beasiswa terhadap tanah air. Namun, pada saat yang sama, konteks sosial-politik Indonesia yang diwarnai isu korupsi dan ketimpangan hukum dimanfaatkan oleh sebagian warganet untuk membangun narasi tandingan yang menggeser polemik ini dari level kesalahan individu menuju ranah kritik struktural atas kinerja penyelenggara negara.

Selanjutnya, dimensi interaksi menunjukkan bahwa kolom komentar media sosial tidak sekadar menjadi wadah statis pertukaran opini, melainkan arena bekerjanya efek riam (*cascade effect*) dan afiliasi lingkungan (*ambient affiliation*). Interaksi antarpengguna yang difasilitasi oleh fitur *likes*, *repost*, dan *quote tweets* terbukti mampu mengamplifikasi sentimen kemarahan kolektif hingga membentuk fenomena bola salju diskursif yang memvalidasi gerakan *cancel culture* serta tindakan kepolisian moral digital (*digital moral policing*). Kendati dominasi opini massa ini berusaha membungkam posisi subjek, interaksi di platform X tidak berjalan satu arah karena struktur interaksi digital yang desentralistik tetap menyisakan ruang bagi munculnya wacana tandingan (*counter-discourse*) untuk menantang dominasi tersebut.

Pada dimensi terdalam, yaitu ideologi dan kekuasaan, hasil analisis menyingkap adanya benturan ideologis yang akut antara poros nasionalisme normatif-punisif dengan poros kewarganegaraan kosmopolitan. Kelompok nasionalisme normatif menggunakan kekuasaan lateral mereka sebagai pembayar pajak untuk mendikte makna amanah, kepatuhan mutlak, dan kewajiban pengabdian di dalam negeri. Sebaliknya, kelompok kewarganegaraan kosmopolitan melakukan perlawanan wacana dengan menegaskan pentingnya membedakan antara loyalitas terhadap negara dengan kritik kritis terhadap pemerintah, serta memandang mobilitas global sebagai hak asasi individu yang rasional. Kontestasi ini juga membongkar relasi kuasa kapiler yang tidak lagi berpusat pada negara, melainkan terdistribusi di antara otoritas legal-formal lembaga beasiswa, tekanan viralitas massa warganet, dan kuasa algoritmik platform X yang sengaja memelihara polarisasi demi keterlibatan pengguna (*engagement*).

Dengan demikian, penelitian ini menyisipkan kesimpulan akhir bahwa ruang komentar media sosial berperan sebagai lembaga pengadilan siber (*cyber-court*) yang memfasilitasi kontestasi makna nasionalisme secara terbuka dan mengaburkan batas antara persoalan privat dengan kepentingan publik. Nasionalisme di ruang siber tidak lagi dipahami secara tunggal atau doktriner melalui narasi *top-down* pemerintah, melainkan telah bergeser menjadi sebuah produk komunikasi yang cair, dinegosiasikan, dan dipertarungkan setiap saat oleh publik digital guna merumuskan kembali arti menjadi seorang warga negara di tengah arus keterbukaan global.

Daftar Pustaka

- Anwar, N. R., & Zamzamy, A. (2026). *Stand-up Comedy sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Wacana Digital pada Konten Program Adu Cuanda x TAYTB Women Warriors di Kanal YouTube OCBC)*. Jurnal JTIC (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 10(2), 743–755. <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i2.5640>
- Bakir, M. R. R., & Nurhaqiqi, H. (2026). *Analisis Wacana Digital Cancel Culture terhadap Abidzar dalam Konten YouTube Cokro TV*. Jurnal JTIC (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 10(1), 65–80. <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i1.4689>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Fuchs, C. (2021). *Social Media: A Critical Introduction* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Griffin, E. (2011). *A First Look at Communication Theory*. McGraw-Hill.
- Hadiputri, D. L., & Trenggono, N. (2023). *Representasi Nasionalisme dalam Pembekalan LPDP Sri Mulyani (Analisa Wacana Kritis Fairclough YouTube LPDP RI)*. MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(2), 98–109.
- Jones, R. H., Chik, A., & Hafner, C. A. (Eds.). (2017). *Discourse and Digital Practices: Doing Discourse Analysis in the Digital Age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315726465>
- Mihelj, S., & Jiménez-Martínez, C. (2021). Digital nationalism: Understanding the role of digital media in the rise of "new" nationalism. *Nations and Nationalism*, 27(2), 331–346. <https://doi.org/10.1111/nana.12685>
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford University Press.
- Rosadiputri, K. D., & Christin, M. (2021). *Komunikasi Persuasif dalam Mempertahankan Loyalitas Relawan pada Komunitas Sosial*. Jurnal Komunikasi Universitas Garut, 7(1), 606–616.
- Sajian, A., & Alif, A. (2025). *Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 4(1), 309–314. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632>
- Trottier, D. (2017). Digital vigilantism as weaponisation of visibility. *Philosophy & Technology*, 30(1), 55–72. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4>
- Tunggali, A. P. W., & Nasher, A. (2026). *Kontestasi Kebhinekaan Pancasila dalam Ekosistem Media Sosial*. Jurnal Komunikasi Universitas Garut, 12(1), 168–175.
- Zappavigna, M. (2012). *Discourse of Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation on the Web*. Continuum.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.